

DEKONSTRUKSI KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL (Studi Analisis Wacana Kritis Fairclough)

Putri Retnosari

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
putriretno92@gmail.com

Rizal Mustansyir,

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Hastanti Widy Nugroho

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

ABSTRACT

Research entitled "Fairclough's Critical Discourse Analysis in exposing the Crime of Political Communication in The Digital Age" is motivated by crime issues that have developed into various social crimes, such as cyber crime, psychological crime, economic crime, and political crime. In the digital age, the crime of political communication is new because this form of crime is sublimated in e-commerce which tends to appeal to all ages. Critical discourse analysis offers a critical perspective in addressing the latest phenomena facing humans in the Digital Age. Especially the phenomenon of technology whose development is increasingly fast and uncontrollable. The purpose of this study is to reveal various forms of political communication crime through critical discourse analysis. The method used in this research is the library method. The results showed that the crime of political communication in the Digital Age occurred through the medium of the Digital Market as a medium of political communication.

Kata kunci: *Critical Discourse Analysis, Crime, Political Communication*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan dalam ilmu sosial diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi seseorang atau kelompok masyarakat (Kusumah, 1982:96). Hal ini menunjukkan bahwasannya, kejahatan ada karena ketimpangan dalam diri manusia yang berakibat pada kerugian yang dialami oleh orang lain. Dengan nama lain, persoalan kejahatan selalu meninggalkan korban, baik berupa kesakitan fisik maupun berupa hancurnya rohani. Menurut Siswanto (2012:14) kejahatan (*evil*) seringkali diidentikkan dengan *crime*, lalu muncullah disiplin ilmu "kriminologi". Melihat fenomena kejahatan, sementara telah berkembang aneka ragam kejahatan sosial, seperti *cybercrime/cyberspace* atau kejahatan dunia maya, *psikology crime* atau kejahatan psikologi, kekerasan simbolik atau kekerasan yang terjadi melalui alam bawah sadar manusia, *economic crime* atau kejahatan ekonomi, *political crime* atau kejahatan politik.

Kejahatan politik diartikan sebagai bentuk kejahatan atas penguasaan individu atau sekelompok orang. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Quiney (1980:27) yang mengatakan bahwa kejahatan politik adalah suatu

ketentuan mengenai perilaku manusia yang diciptakan oleh golongan berkuasa dalam masyarakat yang secara otomatis terorganisir. Pandangan Quiney mengasumsikan bahwa kejahatan politik berarti adanya penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Pada saat itu, kejahatan erat kaitannya dengan hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya, kejahatan berkembang tidak hanya berupa fisik, namun berkembang ke nilai atau kerugian yang dialami oleh korban. Misalnya muncul pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan yang menyerang psikologi manusiapun, tidak bisa menyembuhkan seratus persen korban. Seperti yang dikatakan oleh Hoefnagles (1984:33) bahwa kejahatan yang sempurna membenarkan masa silam, menyelubungi masa mendatang dan memberikan masa kini bau harum pada hukum. Perumpamaan yang disampaikan Hoefnagles menunjukkan bahwa luka atas kejahatan tidak dapat hilang tanpa bekas, namun tetap ada walau sebatas ingatan.

Kejahatan gaya baru terbungkus melalui bentuk komunikasi dan berjalan melalui konsep dominasi. Bentuk lain dari kejahatan adalah kejahatan verbal, Haryatmoko (2003:45) menyebutnya dengan istilah kekerasan simbolik, yaitu kekerasan yang dilakukan melalui dua cara, eufemisme dan mekanisme sensori. Eufemisme membuat kekerasan simbolik menjadi tidak tampak, bekerja secara halus, tidak dapat dikenali dan dapat dipilih secara tidak sadar. Mekanisme sensori menjadikan kekerasan simbolik tampak sebagai moral kehormatan. Contohnya, kesantunan, kesucian, kedermawanan dan sebagainya yang biasa dipertentangkan dengan moral yang rendah seperti kekerasan, kriminal, ketidak pantasan, asusila, kerakusan, dan sebagainya. Pada dasarnya, kejahatan dalam bentuk verbal digunakan untuk menguasai individu atau kelompok tertentu untuk tercapainya sebuah kepentingan.

Kejahatan dalam bentuk verbal juga terjadi dalam komunikasi politik. Pada dasarnya, politik adalah ilmu tentang kekuasaan. Seperti yang disampaikan oleh Lasswell (dalam Cangara, 2009:23), *when we speak of the science of politics, we mean the science of power*. Dengan nama lain, politik memang memuat unsur kejahatan untuk terwujudnya kepentingan. Akan tetapi, politik dibutuhkan untuk terwujudnya kemaslahatan banyak orang. Di samping itu, perlu dipahami bahwa pemahaman komunikasi politik tidak saja diartikan dalam konteks aktivitas politik yang terjadi antar partai politik, masyarakat dan pemerintah tapi juga menyangkut komunikasi yang terjadi antar Negara yang disebut sebagai hubungan internasional. Fokus dalam hubungan internasional adalah aktivitas para diplomat dan tentara yang melaksanakan hubungan luar negeri untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu. Oleh karena itu, hubungan internasional ini disebut sebagai “diplomasi strategi” atau “kerjasama dan konflik”. Dengan demikian, penelitian ini menarik untuk diteliti karena upaya membongkar strategi kejahatan dalam komunikasi politik.

Di Era Digital, manusia dihadapkan dengan berbagai bentuk media darling dan pembayaran elektronik. Di media darling, politik berkembang sedemikian rupa untuk tercapainya tujuan, seperti kampanye hitam (*black campaign*), penyebaran berita palsu (hoax), pemaksaan ideologi tertentu, dan sebagainya. Melalui sistem pembayaran elektronik, politik memasuki

berbagai ranah terselubung yang terduga oleh penggunaannya, seperti uang digital yang tidak jelas arahnya. Dengan demikian, politik menjadi sangat berbahaya ketika kehadirannya tidak disadari dan menyublim bersama era digital.

Kejahatan dalam komunikasi politik akan ditemukan melalui sebuah analisis wacana kritis yang digagas oleh Norman Fairclough. Fairclough adalah seorang filsuf asal Inggris yang menaruh perhatian terhadap konsep bahasa dan kekuasaan. Konsep Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough menawarkan sebuah analisis kritis yang melibatkan konsep linguistik, ideologi dan wacana. Teori ini bekerja untuk membuka pemikiran baru, mengkritisi hal-hal yang dianggap alami namun berdampak mengerikan untuk kemaslahatan banyak orang. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan karena sesuatu yang dianggap alami ternyata menimbulkan korban.

B. METODE

1. Bahan dan Materi Penelitian

Model penelitian ini adalah model penelitian tema aktual tentang kejahatan dalam komunikasi politik. Sesuai dengan jenis penelitian mengenai masalah aktual, maka tugas utama penelitian ini adalah mengidentifikasi filsafat yang tersembunyi dalam kejahatan komunikasi politik, melakukan evaluasi kritis terhadap kejahatan komunikasi politik, dan merumuskan konsep filosofis politik secara utuh (Bakker, 1990:107). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil sumber pustaka berasal dari tulisan-tulisan terkait kejahatan dalam komunikasi politik, serta penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kejahatan politik di era digital yang termuat dalam media darling. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

2. Tahap-tahap penelitian kepustakaan

Penelitian ini melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan penelitian. Penyusunan ini dimulai dari pencarian data yang berkaitan dengan *konsep kejahatan dan komunikasi politik*.
- b. Inventaris data yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mentransliterasi data dalam era digital yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Klasifikasi data dengan memilah-milah data menjadi data primer yang meliputi buku-buku pendukung dalam komunikasi politik dan Era Digital
- d. Pengolahan data, menganalisis hasil dari data yang telah diklasifikasi sehingga apa yang diperoleh adalah pemahaman dalam menentukan arah penelitian.
- e. Pemaparan hasil analisis berupa uraian tertulis.

3. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan untuk mewujudkan kontruksi teoritis (Kaelan, 2005:171), yakni untuk menemukan pola sistematis pandangan filosofis komunikasi politik, teknik analisis data ini menggunakan metode hermeneutika yang meliputi:

- a. Verstehen, metode verstehen digunakan pada tahap penyuntingan data, data yang dikumpulkan berdasarkan karakteristik masing-masing.
- b. Interpretasi, metode interpretasi digunakan pada waktu pengumpulan data untuk menunjukkan arti dari tanda yang dimaksud dalam digital.
- c. Heuristika, metode ini digunakan untuk menemukan suatu jalan baru setelah peneliti melakukan proses penyimpulan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi Politik

Istilah ilmu politik pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576. Ilmu politik yang dimaksud oleh banyak kalangan di Eropa adalah mengenai ilmu Negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa yang bersifat institusional yuridis. Sementara itu, politik yang berkembang di Amerika adalah terkait ilmu politik, yaitu upaya Negara sebagai lembaga politik yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Istilah “politik” saat ini sudah tidak asing lagi, karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan sering kali diatasmamakan dengan label politik.

Dalam Roget’s Trusty Theseasurs, pelaku politik disamakan dengan perbuatan korupsi, pembuat rusuh, tukang protes, penipu dan sebagainya. Politik dicitrakan sebagai perbuatan tidak jujur, curang, tega, kotor, jahanam (Cangara, 2016:72). Atas dasar pemahaman tersebut, politik akhirnya bermakna negatif karena *image* yang diciptakan sedemikian buruknya. Kata “politik” kemudian menjadi cara pandang orang-orang dalam menilai sebuah kelompok partai. Traumatik masyarakat atas tindakan partai politik yang kerap melakukan korupsi, semakin mengafirmasi kepercayaan masyarakat terhadap konsep “politik” adalah hanya sebagai alat mendapatkan kepercayaan saja. Di samping itu, politik tetap dibutuhkan dalam sebuah persaingan pemilihan kekuasaan, untuk tercapainya sebuah cita-cita kebaikan bersama.

Komunikasi politik adalah bagian dari politik, komunikasi dibutuhkan sebagai salah satu cara dalam menyampaikan tujuan politik. Akan tetapi, komunikasi politik berbeda dengan gerakan politik. Seperti yang disampaikan oleh Cangara (2016:11) komunikasi dan politik, adalah dua subdisiplin ilmu yang berbeda. Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *Communico* yang berarti membagi dan *Communis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Sementara itu, politik dimaknai sebagai ilmu kekuasaan. Dapat disimpulkan, bahwa komunikasi politik adalah membangun kebersamaan bersama untuk mencapai sebuah kekuasaan.

Komunikasi politik dapat dibenarkan ketika memberikan informasi dan pesan yang benar dan berisi fakta. Walaupun bahasa yang digunakan bersifat persuasif, dalam komunikasi politik tetap diperlukan azas dan berlandaskan norma-norma berlaku. Salah satu indikator yang menunjukkan komunikasi politik disalahgunakan adalah muatan komunikasi di dalamnya mengandung informasi tidak benar dan mengarahkan seseorang kepada hal-hal yang merugikan.

Meadow dalam Nimmo (2004) mengatakan komunikasi politik adalah “*political communication refers to any exchange of symbols or message that to a significant extent have been shaped by or have consequence for political system*”. Maksud Meadow adalah simbol memiliki peran yang signifikan dalam sistem politik. Hal tersebut menunjukkan, bahwa komunikasi politik berperan penting dalam tercapainya sebuah kepentingan individu ataupun kelompok besar. Akan tetapi, komunikasi politik memikul beban berat untuk menjalankan tugas utamanya yaitu yang bertugas mengambil keputusan bukan untuk perorangan tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, komunikasi politik harus didukung oleh cita-cita politik yang memuat nilai-nilai negarawan agar komunikasi politik digunakan sesuai dengan tugas mulianya yaitu sebagai penentu keputusan.

2. Konsep Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Wacana sebagai praksis sosial menurut Fairclough berfokus pada analisis institusi, organisasi, relasi kelompok, struktur, proses sosial politik untuk dipelajari pada tingkat wacana, komunikasi dan interaksi. Maka, tugas Analisis Wacana Kritis adalah mengalaborasi dan menjelaskan hubungan antar kedua studi, termasuk persinggungan lokal dan global, serta struktur wacana dan struktur masyarakat. Hubungan-hubungan ini merupakan bagian dari proses semiosis (Haryatmoko, 2016:23)

Setelah memperhatikan proses semiosis, dapat dilakukan analisis terhadap wacana. Analisis dimulai dengan memperhatikan 3 dimensi yakni teks, praktik diskursif dan praktik sosial. Pertama, teks mengacu pada wicara, tulisan atau semua bentuk linguistik. Kedua, praktik diskursif yang meliputi semua bentuk produksi dan konsumsi teks. Ketiga, praktik sosial berupa tujuan, jaringan dan praksis budaya sosial yang luas, atau mulai masuk pada pemahaman intertekstual (Fairclough, 1995:98).

Fairclough dan Wodak (dalam Badara, 2012:29) mengungkapkan faktor penting dalam analisis ini adalah menemukan ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Analisis ini menyelidiki bagaimana penggunaan bahasa kelompok sosial yang saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. Ada 5 tahapan penting yang diungkap Fairclough dalam meninjau penggunaan bahasa oleh kelompok tertentu, namun 1 tahapan penting yang secara implisit tidak diungkapkan Fairclough adalah tanda. Tanda sebagai langkah awal dalam menganalisis suatu teks atau wacana, setelah tanda dalam bahasa ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah tahapan-tahapan berikut:

a. Tindakan

Prinsip pertama yang harus dipahami adalah wacana sebagai tindakan. Dengan demikian, wacana diasosiasikan sebagai bentuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk memengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Selain itu, wacana juga dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara

sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

b. Konteks

Konteks diperlukan sebagai pertimbangan dalam analisis wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana dalam hal ini diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Merujuk pada pandangan Cook (Badara, 2012:30), analisis wacana juga memeriksa konteks dari komunikasi: siapa yang mengomunikasikan *dengan siapa* dan *mengapa*; dalam jenis khalayak dan situasi *apa*; melalui medium *apa*; *bagaimana* perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk setiap masing-masing. Studi mengenai bahasa di sini memasukkan konteks, karena bahasa selalu berada dalam konteks dan tidak ada tindakan komunikasi tanpa partisipan, interteks, situasi, dan sebagainya. Meskipun demikian, tidak semua konteks dimasukkan dalam analisis, hanya yang relevan dan berpengaruh atas produksi dan penafsiran teks yang dimasukkan ke dalam analisis.

c. Histori

Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek yang penting untuk bisa mengerti suatu teks ialah dengan menempatkan wacana tersebut dalam konteks historis tertentu. Misalnya, saat melakukan analisis wacana teks selebaran mahasiswa yang menentang Suharto. Pemahaman mengenai wacana teks tersebut hanya dapat diperoleh apabila dapat memberikan konteks historis di mana teks tersebut dibuat; misalnya, situasi sosial politik, suasana pada saat itu.

d. Kekuasaan

Hal selanjutnya yang dipertimbangkan adalah elemen kekuasaan di dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Misalnya, kekuasaan laki-laki dalam wacana mengenai seksisme atau kekuasaan perusahaan yang berbentuk dominasi pengusaha kelas atas kepada bawahan.

e. Ideologi

Ideologi memiliki dua pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia yang menyatakan nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Adapun secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. Sebuah teks tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi.

3. Kejahatan dalam Komunikasi Politik

Mengutip pendapat Bria (2008:41), hal pokok yang perlu dipahami dalam membahas masalah pokok kejahatan adalah apa itu kejahatan?

Sebagaimana telah disepakati kejahatan mencakup 2 sub pokok pembahasan yaitu kejahatan moral dan kejahatan alamiah. Kejahatan moral berupa kejahatan yang muncul dari seseorang atau beberapa pelaku yang secara sadar dan bebas melakukan tindakan yang salah secara moral. Sementara itu, kejahatan alamiah mengacu pada penderitaan yang muncul dari determinasi alamiah. Contoh dari kejahatan moral adalah adanya tindakan yang tidak adil dan tidak jujur sehingga mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Di sisi lain, kejahatan berbentuk alamiah secara inheren terkonstruksi dalam struktur biologis alam termasuk manusia. Secara garis besar berikut perbedaan kejahatan alamiah dan kejahatan moral:

Kejahatan moral	Kejahatan alamiah
Muncul dari seseorang atau beberapa pelaku yang secara bebas dan sengaja melakukan tindakan yang salah	Penderitaan yang muncul secara alamiah
Misalnya membiarkan orang lain mengalami penderitaan atau menjadi korban kejahatan, meskipun ada yang dapat membantunya (<i>evil by ommision</i>)	Terstruktur dalam biologis alam dan diri manusia

Kejahatan politik berada pada ranah kejahatan moral, walaupun keberadaannya tidak dapat diekstradisi atau diakui secara hukum di Indonesia. Hazewinkel Suringa menyatakan kejahatan politik tergolong berdasarkan keyakinan. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Remmelink bahwa perbedaan nyata kejahatan politik dengan kejahatan secara umum dapat dilihat dari motif perbuatannya. Pelaku kejahatan politik menghendaki ZX diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sementara perbuatan politik dilakukan bukan semata-mata karena keberatan terhadap norma yang dilanggarnya, akan tetapi terutama keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dan tertib hukum atau berkeberatan terhadap situasi-situasi hukum yang dianggap tidak adil (Remmelink, 2003:406).

Untuk dapat membaca kejahatan politik secara otentik, diperlukan teori metafisika Anton Bakker dalam mengupas metafisika kejahatan politik, berikut analisisnya:

Apakah kejahatan politik tunggal atau plural?

Kejahatan politik memiliki beranekaragam bentuk. Mulai dari yang terlihat seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1979 tentang Ekstradisi hingga pada yang tak tampak seperti doktrin ideologi untuk meraih kekuasaan, kehadirannya tidak disadari tapi dampaknya cukup dirasakan. Macam-macam kejahatan politik adalah kampanye hitam untuk memenuhi kepuasan diri, melakukan kegiatan eksploitasi orang untuk menguasai pasar, bahkan juga terdapat pada politik di dunia pendidikan seperti memengaruhi keputusan guru dalam memberikan nilai pelajaran melalui kegiatan-kegiatan terselubung.

Seperti yang diketahui politik tidak hanya perihal urusan Negara tapi juga mencakup keseluruhan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan

mempertahankan kekuasaan di masyarakat secara khusus, dan Negara pada umumnya. Dengan demikian, kejahatan politik berdimensi plural.

Apakah kejahatan politik berdimensi jasmani dan rohani?

Kejahatan politik berdimensi rohani sebab secara fisik bentuk kejahatan politik tidak dapat dibuktikan melalui panca indra. Akan tetapi, bentuk kejahatan politik dirasakan dalam alam bawah sadar, sehingga jiwa manusia mengikuti bahkan mengakui kekuasaan politik yang sudah dilakukan oleh pelaku kejahatan politik. Dengan demikian, penderitaan yang dialami korban dalam kejahatan politik merujuk pada satu segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat setelah pelaku berhasil memperoleh kekuasaan, kepercayaan, memperluas, bahkan mempertahankan kekuasaan.

Apakah kejahatan politik memiliki permanensi atau pembaruan?

Kejahatan politik akan terus terjadi pembaruan sebab ilmu-ilmu baru akan terus bermunculan untuk mengatur strategi ketercapaian kejahatan politik. Untuk saat ini, bentuk yang tampak atas kejahatan politik adalah ketidaksadaran korban mengikuti aturan kekuasaan, ke depan konsep kejahatan politik akan mengalami pembaruan wujud. Kerugian yang dialami korban pun dapat berubah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diperbarui oleh penguasa.

Apakah kejahatan politik bernilai atau tidak bernilai?

Kejahatan politik memiliki nilai, nilai yang termuat dalam kejahatan politik adalah berupa doktrin politik. Daniel Bell dalam bukunya yang berjudul "The End of Ideology: On the exhaustion of political ideas in the fifties" memetakan nilai dalam politik jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai acuannya adalah sebagai berikut:

Pancasila	Kejahatan Politik	Deskripsi
Nilai ketuhanan	Ketidajernihan Iman	Tidak ada rasa mengimani Tuhan sehingga kemurnian dalam berpolitik digunakan untuk kepuasan diri
Nilai kemanusiaan	Ketidakbebasan	Ketidakbebasan dalam memilih dan menentukan pilihan hidup
Nilai persatuan	Eksistensialis	Cenderung bersifat individu tidak memikirkan korban kejahatan politik
Nilai kerjasama	Mutlak	Bersifat mutlak karena tidak ada kemungkinan untuk saling membuka pikiran
Nilai keadilan	Diskriminasi	Tidak memiliki hak dalam bersuara dan bertindak

Perlu kiranya untuk mengetahui sumber kejahatan politik. Dalam mengupas sumber-sumber kejahatan politik, penelitian ini juga membutuhkan bantuan teori Rene Descartes tentang konsep skeptisisme. Konsep keraguan

yang digagas oleh Descartes tidak lain dilakukan untuk menemukan konsep kebenaran yang sesungguhnya. Ada 2 subpokok pembahasan dalam konsep skeptis diantaranya adalah tidak ada pengetahuan yang pasti dan tidak ada pengetahuan yang bisa *dijustificasi*.

Setelah melihat konsep skeptisisme secara sederhana di atas, maka kejahatan politik bersumber dari sesuatu yang tidak pasti karena bentuknya yang bebas berada pada pikiran setiap masing-masing individu. Pertanyaan yang mendasar selanjutnya adalah darimana kah datangnya kejahatan politik? Hasrat menjadi sasaran utama atas jawaban ini sebab keinginan untuk menguasai individu maupun kelompok datang dari hasrat. Namun apakah hasrat menjadi sebab utama atas kejahatan politik? Keinginan untuk menguasai suatu kelompok dan individu bertitiktolak dari keinginan yang tersalur melalui hasrat kemudian diwujudkan dalam penanaman ideologi.

Apakah kejahatan politik dapat dibenarkan? Untuk penguasaan suatu wilayah menjadi wilayah yang lebih baik untuk banyak orang maka kejahatan politik dibenarkan. Sesuatu yang bersifat mayoritas memuat nilai kebenaran untuk itu bersikap jahat untuk dapat membawa sesuatu ke arah yang lebih baik dapat dibenarkan. Sementara untuk kekuasaan individu yang berdampak pada banyak kemaslahatan, bentuk kejahatan politik tidak dibenarkan.

Aksiologi kejahatan politik dimaknai sebagai pemaparan nilai-nilai yang terkandung dalam kejahatan politik. Untuk membaca nilai-nilai dalam kejahatan politik penelitian ini membutuhkan teori nilai yang digagas oleh Suriasumantri (2003) yang meliputi *moral conduct* (tindakan moral), *esthetic expression* (ekspresi keindahan), dan *sosio political* (kehidupan sosial politik). Pertama, nilai tindakan moral, kejahatan politik tidak memuat tindakan moral karena kejahatan politik tentu sebuah tindakan yang tidak bermoral karena memaksakan kehendak untuk kepentingan sendiri. Kedua, ekspresi keindahan tidak terlihat dalam kejahatan politik karena keindahan yang terlihat hanya terlihat dari taktik atau siasat yang dilakukan pelaku kejahatan politik karena jika tidak diatur sedemikian rupa maka korban akan merasa jika dikuasi. Ketiga, kehidupan sosial politik dalam kejahatan politik terlihat begitu nyata karena aktivitas sehari-harinya akan selalu berkaitan dengan kegiatan politik.

4. Analisis Wacana Kritis menemukan bentuk kejahatan komunikasi politik di Era Digital

Di Era Digital, manusia dipertemukan dengan berbagai macam *e-commerce*. Menurut Andar (2018:11) website adalah salah satu contoh “toko digital”. Salah satu *e-commerce* tingkat Internasional adalah *digital markets* dengan situs Alibaba.com. Alibaba.com sebagai pasar digital yang membawahi 127 Negara berhasil menguasai pasar Internasional dengan skala besar. Doktrin ideologi yang dibangun dalam *digital markets*nya berhasil mengatur pengecer hingga produsen mengikuti aturan harga pasar yang dibuatnya secara tidak langsung. Hal tersebut dikarenakan, sistem persaingan pasar yang terbuka, membuat setiap elemen pabrik raksasa harus menyesuaikan harga pasar internasional agar tetap mempertahankan konsumennya bahkan juga untuk menjaga harga saham tetap stabil. Tawaran dan ideologi yang telah diterapkan dalam *platform* Alibaba.com tersebut berhasil meraih kekuasaan di

pasar dunia. Di lihat dari segi keuntungan, alibaba.com juga memperoleh banyak keuntungan baik dari agen, produsen maupun pengecer. *Alibaba.com* telah memperoleh kepercayaan dari pasar dengan jaminan-jaminan yang ditawarkan.

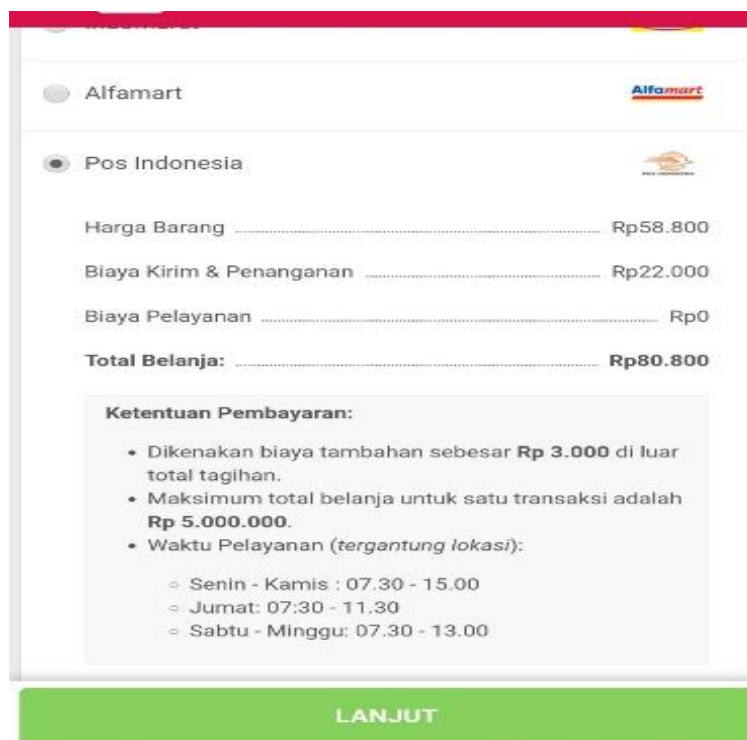
Digital market adalah pemasaran produk atau layanan yang menggunakan teknologi digital, terutama di Internet, tetapi juga termasuk telepon seluler, iklan bergambar, dan media digital lainnya. Perkembangan digital market sudah berkembang sejak tahun 1990. Perkembangan digital markets yang semakin meroket mengubah cara berdagang dan berbisnis manusia. Hingga pada saat ini, manusia menggunakan teknologi sebagai media dalam berbisnis. Hal ini disebabkan dengan *platform digital* semakin masuk dalam dunia pemasaran dan kehidupan sehari-hari. “Digital marketing's development since the 1990s and 2000s has changed the way brands and businesses use technology for marketing. As digital platforms are increasingly incorporated into marketing plans and everyday life (Alexander, 2013: 10)”.

Pelaku kejahatan politik menghendaki pengakuan dari norma-norma yang diperjuangkan, seperti politik dalam bisnis yang telah terurai dalam *digital markets*. Baik *Google*, *Facebook*, *Youtube*, *Alibaba.com*, *Shopee*, *Grab*, dan berbagai macam e-commerce lainnya, masing-masing berusaha memaksakan ideologi dalam platformnya untuk memaksa penggunanya terus menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah mereka sediakan. Politik dalam penguasaan pasar ini sangat diperlukan bagi pelaku digital markets untuk dapat bertahan di dunia pasar *online*. Katakanlah, *friendstar*, *path*, beberapa stasiun TV yang dibeli oleh perusahaan lain karena tidak mampu bertahan di dunia *digital markets*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digital markets merupakan salah satu bentuk kejahatan karena upaya dan usahanya dalam mempertahankan kekuasaan di masyarakat dalam menguasai pasar.

Fenomena politik yang paling tampak dalam *digital markets* pernah dilakukan oleh salah satu platform yang berbasis pada jual beli *online* (*Shopping Online*), yaitu Bukalapak. Sama dengan *E-commerce* lain yang selalu memberikan penawaran dan keuntungan lebih, Bukalapak berhasil menarik perhatian penggunanya. Akan tetapi, seperti yang disampaikan Fairclough diperlukan pemikiran kritis melalui aksan kebahasaan yang ditampilkan. Oleh karena itu, perlu pengamatan lebih lanjut tangkapan layar berikut:



Pertama yang perlu diamati adalah pernyataan “belum termasuk kode pembayaran”. Kode pembayaran akan berbeda-beda hasilnya ketika pengguna memilih media pembayaran yang berbeda. Misalnya, media pembayaran kantor pos kode pembayarannya akan berbeda dengan penggunaan media pembayaran transfer *e-banking*, dan begitu yang lain. Ketika pengguna menggunakan media pembayaran kantor pos akan dikenakan biaya sebesar 3000, berbeda dengan media pembayaran transaksi di Alfamart misalnya yang dikenakan 5000. Seperti tangkapan layar berikut:



Berdasarkan kutipan layar di atas menunjukkan bahwa tambahan pembayaran sebesar 3000 rupiah. Angka tersebut tidak menunjukkan untuk apa biaya tambahan tersebut. Apakah untuk biaya administrasi antar bank, jika iya kenapa tidak disampaikan keterangan biaya tambahan antar bank. Mengapa harus menggunakan bahasa “kode pembayaran”. Bukalapak juga membatasi biaya kode pembayaran maksimal 5000, sementara dapat diketahui biaya administrasi antar bank adalah 6500. Kecurigaan ini, kemudian mengantarkan peneliti terhadap biaya tambahan administrasi sebelum tampilan ini muncul di aplikasi Bukalapak. Tangkapan layar di bawah ini lebih jelas penggunaan dana tambahan yang dikenakan kepada *user*nya oleh Bukalapak:

The screenshot shows a checkout page on Bukalapak. At the top, there is a section titled "Pembeli Prioritas" (Priority Buyer) with a sub-header "Bebas ongkos kirim 3x tiap bulan hanya dengan Rp19.000/bulan. [Syarat & Ketentuan](#)". Below this, there are two radio button options: "Ya, berlangganan." (Yes, subscribe.) and "Donasi Rp500 melalui lembaga ACT". The second option is highlighted with a red hand-drawn rectangle. Below this is a "Voucher" section with a text input field containing "Punya kode voucher Bukalapak?" and a right-pointing arrow. At the bottom, there is a "Rincian Harga" (Price Details) section with a table:

Rincian Harga	
Total harga barang	Rp165.000
Ongkos kirim	Rp13.000

Ternyata tanpa disadari oleh penggunanya terdapat keterangan persetujuan apakah pengguna bersedia menyumbang uang 500 rupiah melalui lembaga ACT. Apa itu ACT? Salah satu tugas analisis wacana kritis adalah untuk melibatkan tanda dalam teks dengan dihubungkan dengan sosial kultural historis dalam penerbitan wacana tersebut. Peneliti melakukan pelacakan terhadap riwayat ACT melalui [Liputanislam.com](#), sebagai salah satu informasi online yang cukup akurat. [Liputanislam.com](#) mengungkapkan 10 lembaga amal Indonesia yang bergerak untuk Suriah dan ISIS adalah salah satunya berlabel IHR . (Indonesia Humanitarian Relief) berada di kota Aleppo di tengah markas pemberontakan ISIS. Sementara itu, IHR adalah proyek kemanusiaan yang menjadi sayap kanan dari ACT. Fenomena tersebut bukan perihal siapa berafiliasi dengan siapa, namun ada uang sepeser pengguna *digital markets* yang mengalir tanpa sadar mendukung perjuangan ‘pemberontakan’ atas nama kemanusiaan.

D. PENUTUP

Komunikasi politik adalah bagian dari politik, sehingga komunikasi dibutuhkan sebagai salah satu cara dalam menyampaikan tujuan politik. Akan tetapi, komunikasi politik berbeda dengan gerakan politik. Cangara (2016:11) menyampaikan komunikasi dan politik adalah dua subdisiplin ilmu yang berbeda. Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *Communico* yang berarti membagi dan *Communis* yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Sementara itu, politik dimaknai sebagai ilmu kekuasaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa komunikasi politik bertugas membangun kebersamaan bersama untuk mencapai sebuah kekuasaan.

Wacana sebagai praksis sosial menurut Fairclough berfokus pada analisis institusi, organisasi, relasi kelompok, struktur, proses sosial politik untuk dipelajari pada tingkat wacana, komunikasi dan interaksi. Maka, tugas Analisis Wacana Kritis adalah mengalaborasi dan menjelaskan hubungan antar kedua studi, termasuk persinggungan lokal dan global, serta struktur wacana dan struktur masyarakat. Analisis Wacana Kritis yang digagas Fairclough membantu membongkar kejahatan dalam komunikasi politik.

Kejahatan politik memiliki beranekaragam bentuk. Mulai dari yang terlihat seperti yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1979 tentang Ekstradisi hingga pada yang tak tampak seperti doktrin ideologi untuk meraih kekuasaan, kehadirannya tidak disadari tapi dampaknya cukup dirasakan. Pelaku kejahatan politik menghendaki pengakuan dari norma-norma yang diperjuangkan, seperti politik dalam bisnis yang telah terurai dalam *digital markets*. Baik *Google*, *Facebook*, *Youtube*, *Alibaba.com*, *Shopee*, *Grab*, dan berbagai macam e-commerce lainnya, masing-masing berusaha memaksakan ideologi dalam platformnya untuk memaksa penggunanya terus menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah mereka sediakan

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Lucy (2013) *Digital Marketing: A content marketer*. Publish in the helpscout.com
- Andar, Desiana (2018) *Seputar Digital Market. Integrated Marketing Solution*: Jakarta
- Badara, Aris (2012) *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Bakker, Anton (1990) *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius: Yogyakarta
- Berger, Arthur Asa (1984) *Signs In Contemporary Culture*. Wisconsin: Sheffield Publishing Company

- Berlo, David (1960) *the Process Communication: An Introduction to Theory and Practice*. East Lansing: Michigan State University, International Communication Institute
- Bourdieu, Pierre (1993) *The field of cultural production: Essays on Art and Literature*. Columbia University Press: Columbia
- _____. (1990) *An introduction to the work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*. London : The Macmillan Press
- Bria, Emanuel (2008) *Jika ada tuhan mengapa ada kejahatan: Percikan filsafat whitehead*. Kanisius: Yogyakarta
- Eriyanto (2006) *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKIS: Yogyakarta
- Fairclough, N. (1955) *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow: Pearson
- _____. (1992) *Discourse and Sosial Change*. Harlow: Pearson
- _____. (1995) *Kesadaran Bahasa Kritis*. Longman Singapore Publishers: Singapura
- _____. (2001) *Language and Power, Second Edition*. Pearson Education Limited: London
- Haryatmoko (2016) *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- _____. (2003) *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa, dalam Basis Nomor 11-12, Tahun ke-52, November-Desember 2003*. Yogyakarta: Kanisius
- Kaelan (2006) *Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein*. Paradigma: Yogyakarta
- _____. (2009) *Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika*. Paradigma: Yogyakarta
- Kasali, Renald (2018) *Self Disruption: Bagaimana perusahaan keluar dari perangkap masa lalu dan mendisrupsi dirinya menjadi perusahaan yang sehat*. Bandung: Mizan Media Utama
- _____. (2017) *Disruption*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- _____ (2018) *The Great Shifting Series on Disruption*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Morissa, Corry Andi Wardani (2010) *Teori Komunikasi Massa*. Ghara Indonesia: Jakarta
- Mulyana (2005) *Kajian Wacana, Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Tiara Wacana: Yogyakarta
- Quinney, R (1970) *The Social Reality of Crime*. Boston: Brown and Company
- Remmelink (2003) *Hukum pidana, Komentar, atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pedana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Rafiudin, Rahmat. *Internet Forensics: Investigasi sumber-sumber kejahatan internet*. CV Andi Offset: Yogyakarta
- Siswanto, Joko (2012) *Filsafat Kejahatan*. Lintang Pustaka Utama: Yogyakarta
- _____ (2000) *Kejahatan dalam perspektif filsafat proses whitehead: evil in perspective whitehead's process philosophy*. Vol 10: No 2. Dipublish oleh jurnal filsafat UGM
- Sobur, Alex (2013) *Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____ (2012) *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wahmuji (1964) *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Wodak, R. , and M. Meyer. 2009. *Methods of Critical Discourse Analysis*. Sage: London
- Whitehead, North Alfred (2009) *Filsafat Proses: Proses dan Realitas dalam Kajian Kosmologis*, terjemahan Saut Pasaribu. Kreasi Wacana: Bantul